

## ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GARUDA BIRU PADA PORTAL BERITA tempo.com, antaranews.com & RRI.co.id

Natalia Endah Hapsari<sup>1</sup>, Nurbaini Futuhat Wulandari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pamulang

Email correspondent: dosen02553@unpam.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap framing artikel berita di Tempo.co, Antaranews.com, dan RRI.co.id terhadap Peringatan Darurat Garuda Biru serta mendeskripsikan makna dari pembingkaiannya tersebut. Analisis framing dilakukan dengan menggunakan metode analisis pembingkaiannya atau framing dari Robert N. Entman yang berusaha mengurai bagaimana satu peristiwa dihadirkan media massa serta mengetahui pula perspektif atau sudut pandang media tersebut terhadap peristiwa yang direkam lewat analisis pembingkaiannya atau framing. Pengambilan data diambil secara purposive sampling berdasarkan berita yang terkait dengan kata kunci garuda biru dan peringatan darurat sepanjang 21-30 Agustus 2024. Dari penelitian ini diketahui Tempo.co melakukan pembingkaiannya berita yang cenderung berpihak pada masyarakat, Antaranews.com cenderung berpihak pada pemerintah, sedangkan RRI.co.id berusaha untuk berimbang pada pihak pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan media turut berpengaruh pada pembingkaiannya berita sehingga masyarakat pun harus lebih cermat untuk memilih media massa yang independen dan tidak berpihak.

**Kata kunci:** framing, garuda biru, kebebasan pers, peringatan darurat, portal berita

### Abstract

*The purpose of this study was to reveal the framing of news articles in Tempo.co, Antaranews.com, and RRI.co.id regarding the Blue Garuda Emergency Warning and to describe the meaning of the framing. Framing analysis was carried out using the framing analysis method from Robert N. Entman which attempts to analyze how an event is presented by the mass media and also to find out the perspective or point of view of the media regarding the event recorded through framing analysis. Data collection was taken purposively based on news related to the keywords blue garuda and emergency warning throughout August 21-30, 2024. From this study, it is known that Tempo.co frames news that tends to side with the community, Antaranews.com tends to side with the government, while RRI.co.id tries to be balanced between the government and the community. This study proves that media ownership also influences news framing so that the public must be more careful in choosing independent and impartial mass media.*

**Keywords:** blue alert, emergency warning, framing, news portal, press freedom

## Pendahuluan

Kehadiran dinasti politik memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia. menggunakan istilah dinasti politik merujuk pada keluarga yang secara berkesinambungan mempertahankan kekuasaan politik dan ekonominya dari generasi ke generasi seperti halnya yang terjadi pada keluarga Indira Gandhi di India, dinasti Benazir Bhutto di Pakistan, hingga keluarga Marcos di Filipina

Kecemasan masyarakat mulai tampak ketika menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, masyarakat dihadapkan dengan manuver politik yang disinyalir memudahkan jalan anak-anaknya menduduki posisi dalam pemerintahan. Ini berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia calon wakil presiden.

Terhitung pada Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut keputusan MK ini, seseorang yang pernah dipilih melalui pemilu sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun berusia di bawah 40 tahun (Ulya & Mantalean, 2023).

Atas putusan tersebut, Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden Joko Widodo, berhasil masuk dalam kancah pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai cawapres Prabowo Subianto dalam usia 36 tahun.

Sekitar dua bulan sebelum pergantian pemerintahan baru, MK pun membuat keputusan baru terkait kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024, yang membuat pedoman baru untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Putusan ini dihasilkan dari permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora, yang melanggar persyaratan Undang-Undang Pilkada.

Keputusan tersebut menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah di antaranya penetapan ambang batas pendaftaran calon kepala daerah berdasarkan jumlah penduduk dan perolehan suara partai politik seperti provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 6,5 persen di provinsi tersebut.

Atau bila jumlah penduduk dalam atau provinsi lebih dari 6 juta hingga 12 juta jiwa, maka partai politik atau koalisi parpol bisa mengusung calon asalkan memiliki suara sah minimal 7,5 persen di provinsi tersebut. Bandingkan dengan peraturan sebelumnya yang menetapkan partai politik harus memiliki 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu terakhir dulu baru bisa mengusung calon sendiri

Selain itu, MK memeriksa Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada, yang menetapkan usia minimal calon kepala daerah. Usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota adalah 25 tahun.

Keputusan MK itulah yang memicu perubahan signifikan dalam peta penentuan calon kepala daerah yang bakal ikut bersaing dalam kancah pilkada. Masyarakat pun mulai mendeteksi adanya upaya di level legislatif yang berusaha merevisi UU Pilkada sehingga bisa meloloskan figur lain yang belum memenuhi syarat batas minimal usia agar bisa lolos masuk dalam persaingan pilkada.

Hingga akhirnya pada pada 21 Agustus 2024 media sosial diramaikan dengan unggahan Peringatan Darurat dengan latar belakang berwarna biru dengan lambang negara Burung Garuda di bagian tengah. Unggahan terus pun terus saja disebar oleh para pemengaruh (influencer) serta warganet Indonesia. Boleh dibilang lambang garuda biru sebagai bentuk langkah masyarakat untuk mewaspadai dan mengantisipasi aksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berusaha untuk menjegal putusan MK soal UU Pilkada. Manuver tersebut disinyalir dilakukan oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR yang bergerak

sigap berusaha melakukan revisi terhadap UU Pilkada yang siap mengubah aturan pada putusan MK tersebut hanya dalam waktu singkat yaitu sekitar tujuh jam. Upaya itulah yang berusaha dilawan oleh masyarakat sehingga unggahan Garuda Biru kian gencar dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber, gambar garuda biru itu berawal dari video analog karya EAS Indonesia Concept berjudul "EAS Indonesia Concept (24/10/1991), ANM-021 (Mesem) - First Encounter" yang diunggah pada 24 Oktober 2022. EAS sendiri diketahui merupakan bentuk satu sistematis peringatan darurat nasional Amerika Serikat. Konsepnya dibuat sedemikian rupa untuk menebarkan pesan darurat saat siaran radio dan televisi. Ketika jagat media sosial ramai oleh unggahan garuda biru yang disebar oleh warganet tanah air, media massa turut memberitakan fenomena tersebut. Media massa memiliki peran strategis karena memiliki peran sebagai saluran penyampai informasi kepada khalayak atau publik secara serempak dan berfungsi untuk menyebar informasi dengan menjangkau masyarakat dengan bebas serta biaya yang terjangkau. Tidak hanya berupaya meraih khalayak yang lebih luas, media juga berusaha menjaga keseimbangan hubungan antara pengirim dan penerima. (1)

Media massa juga turut memberikan pengaruh pembentukan opini publik. Ketika memutuskan satu berita, media massa turut mempertimbangkan faktor sosial dan politik. Bahkan tak jarang media massa termasuk portal berita harus merujuk pada opini yang berkembang dalam masyarakat dan sensitivitas satu isu ketika memutuskan untuk menayangkan satu berita. Inilah yang kemudian memengaruhi keputusan untuk menurunkan satu berita dan pembungkaman yang disajikan pada audiens.

Saat situasi politik dan sosial bergerak dinamis, media massa pun harus mengambil keputusan yang tepat serta meminimalisasi risiko terjadi kontroversi akibat berita yang diturunkan. Kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) ikut membantu langkah media untuk merespons satu isu dengan cepat. Namun, hal ini menimbulkan tantangan karena media harus memastikan kecepatan dan penggunaan teknologi tidak akan berdampak pada akurasi berita yang diturunkan

Respons cepat media massa cukup terlihat saat memberitakan aksi garuda biru di dunia maya hingga akhirnya aksi peringatan di dunia maya pun berlanjut dengan gerakan demonstrasi massa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis, 22 Agustus 2024. Di Jakarta, aksi demo besar berlangsung di depan Gedung DPR RI. Hal serupa juga terjadi pada gedung DPRD di berbagai wilayah tanah air. Namun, hal tersebut tak serentak dilakukan oleh seluruh media massa terutama media massa 'pelat merah' milik pemerintah sehingga menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Terkait itu, penelitian ini akan mengulas framing pemberitaan di Tempo.co, Antarnews.com, dan RRI.co.id terhadap simbol garuda biru bertuliskan peringatan darurat yang bisa disebut sebagai alarm awal masyarakat untuk peka terhadap peta perpolitikan tanah air hingga bisa mengubah konstelasi pemilihan kepala daerah dengan melakukan gerakan masif mencegah upaya badan legislatif melakukan revisi UU Pilkada. Adapun pemilihan ketiga media portal berita tersebut dilakukan berdasarkan status kepemilikan media yang berbeda yaitu media massa milik pemerintah dan milik swasta.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan framing pemberitaan di Tempo.co, Antarnews.com, dan RRI.co.id terkait berita peringatan darurat garuda biru dan menjelaskan keterkaitan framing pemberitaan yang dilakukan oleh ketiga portal berita tersebut dengan status kepemilikan media.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. menyebutkan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengizinkan peneliti mengamati secara mendetail dan memakai metode yang spesifik seperti wawancara, focus group discussion (FGD), observasi, hingga sejarah hidup.

Metode penelitian kualitatif dianggap lebih mampu menjelaskan perilaku dan tindakan manusia daripada metode penelitian ilmu alam. Peneliti dapat menggunakan data kualitatif untuk mempertahankan alur kronologis, melihat secara detail peristiwa yang menyebabkan hasil tertentu, dan mendapatkan penjelasan yang bermanfaat. Kata-kata, terutama yang menceritakan sebuah cerita atau peristiwa, memiliki makna yang lebih nyata dan jelas, yang dapat membuat pembaca lebih percaya pada kesimpulan yang didasarkan pada angka.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh secara purposive sampling yaitu berita-berita yang terkait dengan kata kunci atau tagar seputar Garuda Biru dan peringatan darurat yang diunggah di portal berita Tempo.co, Antaranews.com, dan RRI.co.id sepanjang bulan Agustus, tepatnya 21-30 Agustus 2024.

Teknik purposive sampling atau pengambilan sampel secara sengaja merupakan teknik yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, yang menawarkan berbagai kelebihan dan keterbatasan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih partisipan atau data dalam penelitian berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga meningkatkan relevansi data yang dikumpulkan. Metode ini memungkinkan penyesuaian kriteria pemilihan partisipan seiring dengan perkembangan penelitian, dengan mengakomodasi wawasan yang muncul (

Data artikel tersebut kemudian dianalisis dengan teknik framing atau pembingkaihan dari Robert N Entman yang berusaha mengurai bagaimana satu peristiwa dihadirkan media massa serta mengetahui pula perspektif atau sudut pandang media tersebut terhadap peristiwa yang direkam lewat analisis pembingkaihan atau framing (Wahidar & Yozani, 2020).

Kebijakan pemberitaan media tak pelak terpengaruh pula oleh pembingkaihan (framing) atas satu peristiwa. Hasrullah (2013) menyebutkan framing berupaya untuk menonjolkan hal yang telah diseleksi (Wardani & Suprayitno, 2023).

Analisis framing Entman berusaha mengurai bagaimana satu peristiwa dihadirkan media massa serta mengetahui pula perspektif atau sudut pandang media tersebut terhadap peristiwa yang direkam lewat analisis pembingkaihan atau framing (Wahidar & Yozani, 2020).

Entman meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media (Riauan et al., 2020). Konsep framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (storytelling) media atau peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2011).

Ini karena secara teknis seorang wartawan tidak mungkin bisa melakukan framing atau pembingkaihan terhadap seluruh bagian berita melainkan hanya bagian dari kejadian yang penting saja (happening) dalam sebuah berita yang akan menjadi objek framing wartawan (Sobur, 2018).

Analisis pembingkaihan berita menurut Entman dilakukan dengan empat cara yaitu melakukan identifikasi masalah (problem identification) yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa, selanjutnya identifikasi pada penyebab masalah (causal interpretation) yaitu siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Setelah itu Entman menekankan pada evaluasi moral yang berupa penilaian atas penyebab masalah dan adanya saran penanganan masalah (treatment recommendation) yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya (Sobur, 2018).

Penelitian ini menganalisis artikel yang diperoleh dari portal berita Tempo.co, Antaranews.com, dan RRI.co.id sesuai dengan empat tahap Entman tersebut. Kriteria pemilihan artikel berita ditelaah berdasarkan kata kunci garuda biru dan peringatan darurat. Dari hasil analisis data itulah, peneliti akan menarik kesimpulan pembingkai berita yang dilakukan oleh tiap portal berita dalam hal ini yaitu Tempo.co, Antaranews.com, serta RRI.co.id serta menelaah keterkaitan framing dan kepemilikan media.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. menyebutkan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengizinkan peneliti mengamati secara mendetail dan memakai metode yang spesifik seperti wawancara, focus group discussion (FGD), observasi, hingga sejarah hidup (2)

Metode penelitian kualitatif dianggap lebih mampu menjelaskan perilaku dan tindakan manusia daripada metode penelitian ilmu alam. Peneliti dapat menggunakan data kualitatif untuk mempertahankan alur kronologis, melihat secara detail peristiwa yang menyebabkan hasil tertentu, dan mendapatkan penjelasan yang bermanfaat. Kata-kata, terutama yang menceritakan sebuah cerita atau peristiwa, memiliki makna yang lebih nyata dan jelas, yang dapat membuat pembaca lebih percaya pada kesimpulan yang didasarkan pada angka.(3)

Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh secara purposive sampling yaitu berita-berita yang terkait dengan kata kunci atau tagar seputar garuda biru dan peringatan darurat yang diunggah di portal berita Tempo.co, Antaranews.com, dan RRI.co.id sepanjang bulan Agustus, tepatnya 21-30 Agustus 2024.

Teknik purposive sampling atau pengambilan sampel secara sengaja merupakan teknik yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, yang menawarkan berbagai kelebihan dan keterbatasan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih partisipan atau data dalam penelitian berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga meningkatkan relevansi data yang dikumpulkan. Metode ini memungkinkan penyesuaian kriteria pemilihan partisipan seiring dengan perkembangan penelitian, dengan mengakomodasi wawasan yang muncul (4)

Data artikel tersebut kemudian dianalisis dengan teknik framing atau pembingkai dari Robert N Entman yang berusaha mengurai bagaimana satu peristiwa dihadirkan media massa serta mengetahui pula perspektif atau sudut pandang media tersebut terhadap peristiwa yang direkam lewat analisis pembingkai atau framing (5)

Kebijakan pemberitaan media tak pelak terpengaruh pula oleh pembingkai (framing) atas satu peristiwa. Hasrullah menyebutkan framing berupaya untuk menonjolkan hal yang telah diseleksi

Analisis framing Entman berusaha mengurai bagaimana satu peristiwa dihadirkan media massa serta mengetahui pula perspektif atau sudut pandang media tersebut terhadap peristiwa yang direkam lewat analisis pembingkai atau framing .(6)

Entman meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media Konsep framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (storytelling) media atau peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media .(7)

Ini karena secara teknis seorang wartawan tidak mungkin bisa melakukan framing atau pembingkai terhadap seluruh bagian berita melainkan hanya bagian dari kejadian yang penting saja (happening) dalam sebuah berita yang akan menjadi objek framing wartawan ((8)

Analisis pembedaan berita menurut Entman dilakukan dengan empat cara yaitu melakukan identifikasi masalah (problem identification) yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa, selanjutnya identifikasi pada penyebab masalah (causal interpretation) yaitu siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Setelah itu Entman menekankan pada evaluasi moral yang berupa penilaian atas penyebab masalah dan adanya saran penanggulangan masalah (treatment recommendation) yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya (8)

Penelitian ini menganalisis artikel yang diperoleh dari portal berita Tempo.co, Antaranews.com, dan RRI.co.id sesuai dengan empat tahap Entman tersebut. Kriteria pemilihan artikel berita ditelaah berdasarkan kata kunci garuda biru dan peringatan darurat. Dari hasil analisis data itulah, peneliti akan menarik kesimpulan pembedaan berita yang dilakukan oleh tiap portal berita dalam hal ini yaitu Tempo.co, Antaranews.com, serta RRI.co.id serta menelaah keterkaitan framing dan kepemilikan media.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam pemberitaan garuda biru dan peringatan darurat, Antaranews.com menurunkan 3 berita terkait peringatan darurat sedangkan RRI.co.id menurunkan sekitar 7 berita terkait peringatan darurat dan garuda biru. Sedangkan, dalam kurun waktu yang sama, Tempo.co menurunkan sekitar 9 berita yang terkait kata kunci tersebut.

**Tabel 1. Artikel berita terkait peringatan darurat di RRI.co.id, Antaranews, dan Tempo.co**

No	Tanggal	Judul RRI.co.id	Judul Antaranews.com	Judul Tempo.co
1	21 Agustus 2024	"Peringatan Darurat" Viral di X atau Twitter		DPR Tolak Putusan MK, Gambar Peringatan Darurat Bermunculan di Media Sosial
		Viral, Ini Makna Peringatan Darurat Garuda Biru		
		Peringatan Darurat Indonesia Garuda Biru Viral, Ungkapan Turun ke Jalan		
		Ramai Posting Garuda Berlatar Biru Bertuliskan "Peringatan Darurat" Apa Maksudnya?		
2	22 Agustus 2024	Viral Di Media Sosial Peringatan Darurat Garuda Biru, Ada Apa Sebenarnya?	Waka DPR: Banyak anggota absen paripurna karena kunker ke luar kota	Tagar Tolak Pilkada Akal-akalan Viral dan Trending Topic di Media Sosial X

			Amnesty: Aksi protes “Peringatan Darurat” harus bebas ancaman	Dua Putusan MK Jadi Sumbu Pergerakan Aksi Massa dan Viral Peringatan Darurat
				Social Media Flooded with 'Emergency Warning' Blue Pictures After House Rejects Court Decision
3	23 Agustus 2024	Peringatan Darurat Viral, Kekhawatiran Masyarakat di Media Sosial	Media Jepang soroti aksi protes pascaputusan MK dan RUU Pilkada	Blue Alert Pernah Dilakukan di AS, Berikut Makna Peringatan Darurat Garuda Berlatar Biru
4	24 Agustus 2024	Asal Mula Logo Burung Garuda Berlatar Biru "Peringatan Darurat"		
5	28 Agustus 2024			Ramai Diboikot, Raffi Ahmad Beri Alasan Tak Unggah Peringatan Darurat dan Turun Demo di DPR
				Aksi Massa Menyala di Sejumlah Daerah Kawal Putusan MK dan Darurat Demokrasi, Apa Tuntutan Mereka?
				Usai Peringatan Darurat, Ribuan Akademisi UGM Keluarkan Pernyataan Sikap Darurat Demokrasi
6	30 Agustus 2024			Akun Instagram ICW Suspend, Diduga karena Konten RUU Perampasan Aset hingga Peringatan Darurat

Sumber: Olahan peneliti

Ketika menurunkan atau menayangkan berita, media massa sudah memiliki kebijakan tersendiri terhadap satu isu.(9) Kebijakan tersebut tergantung pada visi dan misi perusahaan media yang bersangkutan serta bergantung juga pada kepentingan dari pemilik media. Pemilik media dapat ikut menentukan arah kebijakan dan pembingkai berita yang ditayangkan oleh media tersebut. Meski tidak terlibat secara teknis, garis kebijakan redaksi turut dipengaruhi oleh keinginan pemilik Pola peliputan media termasuk bahasa dan pemilihan narasumber yang berat sebelah digunakan untuk melukiskan konflik dan menyudutkan pihak tertentu sehingga penafsiran peristiwa tersebut kemudian dipahami sebagai realitas sosial oleh khalayak (10)

Kelompok penguasa dapat menggunakan media untuk memperoleh perhatian dan simpati, dan kesetiaan dari masyarakat termasuk pula menciptakan dan memperkuat kredibilitasnya sendiri serta menjatuhkan kredibilitas pihak lawan (11)

Media massa milik pemerintah seperti halnya Antaranews.com dan RRI.co.id memiliki kebijakan atau arah pemberitaan yang berbeda dengan media massa yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau kelompok seperti halnya Tempo.co.

Hal inilah yang berimbas pada pemingkaian berita yang dilakukan bisa berbeda antara media massa yang satu dan yang lain. Secara kepemilikan media, Antaranews.com dan RRI.co.id merupakan media milik pemerintah. Dilansir dari laman resminya Antaranews.com, Antara telah resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional sejak Mei 1962. Sejak itulah, Antara yang diubah namanya menjadi LKBN Antara menghadirkan foto dan berita. Selanjutnya, sejak 18 Juli 2007, melalui PP no 40/2007, Antara menjadi bagian dari keluarga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan namanya kembali berubah menjadi Perum LKBN Antara. Dalam perkembangannya, Kantor Berita Antara memiliki berbagai media lain sesuai platform yang dibutuhkan masyarakat sehingga hadir pula portal berita Antaranews.com.

Sedangkan RRI yang berawal dari stasiun radio milik pemerintah, kini juga memiliki portal berita dengan tautan RRI.co.id. Sejarah RRI dimulai dengan pertemuan 8 mantan karyawan radio Hosu Kyoku bertemu dengan pemerintah di rumah Adang Kadarusman di Jalan Menteng Dalam, Jakarta. Dilansir dari situs resmi RRI, dari hasil rapat itulah diputuskan bahwa Abdulrahman Saleh menjadi pemimpin umum pertama RRI. RRI sendiri resmi berdiri pada 11 September 1945 atau berselang beberapa pekan saja setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. Kini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan jagat dunia maya, RRI memiliki platform portal berita yaitu RRI.co.id.(12)

Sementara majalah Tempo didirikan pada tahun 1971 melalui perundingan enam orang wartawan. Dalam pertemuan dengan Ciputra, pendiri dan ketua Yayasan Jaya Raya, serta Eric Samola, sekretaris, Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono turut berpartisipasi. Rapat berlangsung di kantor Ciputra di kawasan Proyek Senen. Selanjutnya, rapat berlangsung sepanjang malam di kediaman Ciputra di Slipi, Jakarta Barat, sampai tuntas. Perundingan menghasilkan pembentukan majalah Tempo yang didanai oleh Yayasan Jaya Raya.

Berawal dari penerbitan majalah, Tempo pun berkembang mengikuti zaman dengan membentuk pula platform digital. Dengan alasan agar bisa beradaptasi dengan perubahan pasar dan industry media, Tempo membangun portal berita dengan nama Tempo.co.

Merujuk pada frekuensi pemberitaan terkait kata kunci garuda biru dan peringatan darurat yang dilakukan oleh tiga media massa tersebut, faktor kepemilikan media turut memberi pengaruh. Di hari pertama yaitu tanggal 21 Agustus 2024 yang menandakan mulai terdeteksi gerakan dunia maya yang menyuarakan aksi peringatan darurat dan garuda biru, ketiga media memberikan reaksi berbeda. Pada hari itu, Tempo.co menurunkan satu berita yang memotret situasi maraknya gambar peringatan darurat di media menyusul menyusul langkah pemerintah dan DPR RI menolak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Di hari yang sama, Antaranews.com tidak menurunkan berita apa pun terkait peringatan darurat dan garuda biru. Sementara, RRI.co.id terlihat responsif memberitakan fenomena ini dengan menayangkan empat artikel sekaligus.

Dalam pemberitaannya, RRI.co.id terlihat cukup objektif melihat fenomena yang terjadi dengan memberikan porsi yang berimbang antara masyarakat dan pemerintah. Lewat empat berita tersebut, RRI.co.id tidak hanya memberikan porsi yang cukup untuk memberitahukan pada masyarakat adanya gerakan peringatan darurat. Salah satu upaya memberikan porsi yang berimbang (cover both sides), RRI.co.id memuat suara terbuka dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang dianggap sebagai lembaga

tandingan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan organisasi pers pertama di Indonesia. AJI pun kerap menyuarakan perlawanan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, RRI.co.id juga menghadirkan narasumber dari pemerintahan yang mampu memberikan jawaban yang menyejukkan semua pihak lewat pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang bersedia menerima masukan dari berbagai pihak terkait pembahasan RUU Pilkada. Namun, pada 22 Agustus 2024, RRI.co.id tercatat hanya menayangkan satu berita tentang garuda biru dan peringatan darurat. Dalam pemberitaan tersebut, RRI membingkai berita dengan mengangkat fenomena gerakan dunia maya atau media sosial yang menyuarakan aksi kawal putusan MK lewat simbol garuda biru dan peringatan darurat. Dalam tulisan tersebut, RRI merangkum aksi warganet media sosial yang ramai menyuarakan keprihatinan terhadap manuver DPR RI serta mengajak untuk sama-sama mengawal putusan MK yang muncul dalam pernyataan sebagai berikut: Di hari yang sama, Antaranews.com mulai memberitakan peristiwa tersebut dengan menurunkan dua berita yang muncul dengan kata kunci peringatan darurat. Dalam kedua berita tersebut, Antaranews.com terlihat berusaha memberikan porsi berimbang antara sisi pemerintah dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, Antaranews menurunkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memastikan rapat paripurna ketiga DPR RI dengan agenda pengesahan RUU Pilkada itu batal digelar dan akan dijadwal ulang karena tidak memenuhi kuorum. Sementara dari sisi masyarakat, Antaranews menampilkan narasumber dari Amnesty Internasional yang merupakan lembaga internasional yang memiliki visi untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

Sementara Tempo.co juga menayangkan tiga berita. Bedanya, Tempo lebih banyak mengangkat sumber dari sisi masyarakat dan pendukung gerakan peringatan darurat dan garuda biru. Dalam upaya memberikan porsi yang berimbang, Tempo mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di kompleks parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, 21 Agustus 2024 yang intinya lebih memilih mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai lebih memuluskan jalan anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, mengikuti ajang pilkada: "Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?"

Pada 23 Agustus 2024, ketiga media masih menayangkan pemberitaan peringatan darurat dan garuda biru dengan bingkai yang berbeda. RRI.co.id dan Tempo.co sama-sama mengangkat fenomena kecemasan masyarakat di media sosial yang disimbolkan dengan garuda biru dan peringatan darurat. Sementara Antaranews.com lebih memilih untuk tidak terlalu menonjolkan euforia garuda biru dan memilih mengangkat pemberitaan media massa Jepang yang ramai menayangkan artikel seputar aksi demonstrasi yang melancarkan protes terkait manuver DPR dan RUU Pilkada.

Pada 24 Agustus, hanya RRI.co.id yang masih menurunkan artikel dengan kata kunci garuda biru dan peringatan darurat kendati isinya berkisar mengulang tulisan tentang asal usul garuda biru yang ramai di media sosial.

Setelah itu, hanya Tempo.co yang masih menayangkan berita terkait peringatan darurat dan garuda biru yang membingkai pemberitaan dari sudut pandang pendukung gerakan garuda biru. Pada 28 Agustus 2024, Tempo menggunakan kembali kata kunci peringatan darurat dan garuda biru dengan menyoroti pemberitaan seputar aksi massa yang berlangsung di sejumlah daerah serta aksi ribuan akademisi yang memberikan pernyataan sikap darurat demokrasi serta menayangkan pemberitaan dari sosok figur publik Raffi Ahmad yang dinilai kurang pro terhadap gerakan garuda biru. Selanjutnya, pada 30 Agustus 2024, Tempo kembali menurunkan berita dengan kata kunci peringatan darurat dengan menyoroti berita tentang akun Instagram ICW yang diblokir karena diduga menayangkan tulisan terkait peringatan darurat.

Jauh sebelum kegaduhan politik hingga terbit simbol garuda biru dan peringatan darurat, Tempo termasuk media yang cukup sering memberikan kritik keras pada pemerintah. Sebelumnya, majalah Tempo sudah lebih dulu menurunkan edisi khusus yang membahas tentang 10 tahun Presiden Jokowi berkuasa dengan judul Nawadosa Jokowi Dua Periode. Dari hasil penelusuran penulis, Tempo sempat mengalami kendala karena majalah tersebut selalu habis terjual tak lama setelah diterbitkan. Melihat adanya gelagat yang kurang positif, Tempo memutuskan untuk menayangkan seluruh artikel secara lengkap di laman majalah Tempo secara utuh pada masyarakat (<https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/172010/nawadosa-jokowi-dua-periode#>).

Dari struktur kepemilikan saham, saat ini pemegang saham Tempo Media Group adalah PT Grafiti Pers sebesar 24,28% dan masyarakat sebesar 25,49% sehingga boleh dikatakan Tempo termasuk dalam media massa yang bebas dari intervensi pemerintah. Ini terlihat dalam pemberitaan seluruh media Tempo yang berformat cetak dan digital yang tetap independen dan cenderung pro rakyat.

Hal ini berbeda dengan situasi Antaranews.com. Sebagai bagian dari Kantor Berita Antara, Antaranews.com tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, Antara resmi bergabung menjadi keluarga besar Kementerian BUMN dan berubah menjadi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara pada 8 Juli 2007. Dengan bergabung dalam Kementerian BUMN, pemberitaan Antara tak lepas dari sudut pandang pemerintah meski berupaya untuk objektif dengan memberikan porsi secukupnya agar dapat melingkupi dua sisi pemberitaan (cover both sides). Hal ini setidaknya terlihat dalam pemberitaan terkait peringatan darurat yang muncul sekadar memotret fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Antaranews lebih banyak menyoroti dukungan pada lembaga negara dalam hal ini DPR RI dan Mahkamah Konstitusi daripada mengangkat aspirasi masyarakat yang berusaha mengawal jalannya sistem demokrasi.

Sementara RRI.co.id memiliki status kepemilikan yang sedikit berbeda dari Antara. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI adalah lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara dengan tujuan menyediakan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dalam situs resminya, RRI juga disebutkan berstatus sebagai perusahaan jawatan (perjan) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung. Dengan status tersebut, boleh dikatakan RRI termasuk media massa milik pemerintah yang lebih independen. Dalam kaitan dengan fenomena garuda biru dan peringatan darurat, hal ini pun terlihat dari frekuensi pemberitaan RRI yang terlihat cukup gencar di awal merebaknya gerakan garuda biru di media sosial. Bahkan, media massa independen seperti Tempo pun tak segegar RRI memberitakan fenomena gerakan garuda biru. RRI lebih mengangkat fenomena yang berkembang dalam masyarakat dengan pbingkai pada aksi dan gerakan yang terjadi terutama di dunia media sosial.

## Kesimpulan

Status kepemilikan media berpengaruh sangat signifikan terhadap kebebasan pers. Hal ini pun terlihat dari framing yang dilakukan media terhadap produksi berita. Dalam pemberitaan gerakan garuda biru dan peringatan darurat, tiga media massa arus utama seperti Tempo.co, Antaranews.com, dan RRI.co.id memiliki framing masing-masing. Tempo.co dengan status kepemilikan mayoritas adalah publik tampak gencar memberitakan peristiwa garuda biru dan peringatan darurat dengan memunculkan artikel berita dengan kata kunci tersebut sepanjang 21-30 Agustus 2024. Sedangkan Antaranews.com yang merupakan kantor berita milik pemerintah dan masuk dalam jajaran BUMN hanya menurunkan tiga artikel dengan kata kunci tersebut. Ada pun RRI.co.id yang berstatus sebagai perusahaan jawatan yang termasuk Badan Usaha Milik Negara yang tidak mengejar keuntungan memberikan porsi yang berimbang dalam

pemberitaan. Bahkan, saat awal fenomena gerakan garuda biru merebak dalam masyarakat, RRI.co.id termasuk salah satu media massa yang cukup intens memberitakan peristiwa tersebut. RRI.co.id pun bisa dikategorikan sebagai media massa milik pemerintah yang berusaha menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik dengan memberikan informasi yang tetap netral dan tidak komersial untuk masyarakat. Masyarakat pun diharapkan dapat memilih dan memilah media massa yang tepat untuk memperoleh informasi yang objektif dan berimbang. Status kepemilikan media pun bisa menjadi salah satu faktor penentu ketika memilih media massa yang independen, netral, dan tetap berimbang pada kedua pihak (cover both sides).

## References

1. Baran, SJ, & Davis D. Teori komunikasi massa. 2016.
2. Habsy BA. Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. JURKAM J Konseling Andi Matappa. 2017;1(2):90.
3. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Alfabeta; 2005.
4. Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosda Karya; 1999.
5. Wirman W, Yozani RE, Wahidar TI, Zurani I. Sosialisasi Penerapan Pola Hidup Bersih bagi Anak Sekolah Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti - Riau. PARAHITA J Pengabdian Kpd Masy. 2021;1(2):38–42.
6. Wahidar TI, Yozani RE. Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau. pos.co dan Tribunpekanbaru.com periode 15-17 September 2019. J Kaji Jurnalisme. 2020;4(1):47.
7. Pangaribuan OC, Eriyanto E. Hiperrealitas Jokowi Pada Video Opening Ceremony Asian Games 2018. WACANA, J Ilm Ilmu Komun. 2019;18(1).
8. Sobur A. Bercengkerama dengan Semiotika [Internet]. Vol. 3, Mediator: Jurnal Komunikasi. 2002. p. 31–50. Available from: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/746>
9. Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani II. Komunikasi massa. KOMUNIKASI MASSA. 2020. 100 p.
10. Mulyana D. Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar). Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2014.
11. MULYANA, Deddy et al. Cultures and communication. Rosda; 2012.
12. Sumarto RH. Komunikasi Dalam Kegiatan Public Relations. Informasi. 2016;46(1):63.